

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH MELALUI IMPLEMENTASI STANDAR ISI DAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Taufiq

**Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Taufiqahmad03@gmail.com**

ABSTRACT

The purpose of this study is divided into two general purpose and special purpose. The general objective of this study was to determine the quality improvement of education in MAN 2 Kota Serang along with the factors that influence it. While the purpose of this study was to reveal khusus implementation of content standards and processes related to improving the quality of education in educational institutions of Islamic Madrasah Aliyah in Serang, Banten. This study will provide a clear picture based on the existing realities on improving the quality of education through the implementation of content standards and the educational.

The focus of this research is to answer the question of: (1) How is the Implementation of Content Standards in MAN 2 Kota Serang, (2) How is Implementation Standards process at MAN 2 Kota Serang (3) How is the efforts to improve the quality of learning through the implementation of content standards and processes in Man 2 Serang city. This is a qualitative descriptive study. The design is a case study with a research setting conducted in Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Serang. With key informants such as Head of MAN 2, then another informant is chairman of the school committee, the head of the MDC (Madrasah Development Centre) and Head PENMA (madrasah education) Banten Province. Data were collected through interviews, documentation and observation. Based on the results of data analysis researchers obtained the following findings: (1) the implementation of education content standards in MAN 2 has been going well, according to conditions set by the government. (2) the implementation of the education process is going well, conducive, varied and innovative. (3) Efforts by the madrasah in improving the quality of learning by way of boarding school system and learning resource center (PSBB).

Keywords: Content Standard, Process Standards, Quality Teaching, Madrasah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi

pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hidayat dan Machali (2009: 3), menyebutkan bahwa terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, reformasi pendidikan meliputi empat hal yaitu :

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga; Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai

dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4. Mecerdaskan kehidupan bangsa berarti mencerdaskan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia agar mampu hidup layak dan terhormat di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, pembangunan dalam dunia pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka besar pembangunan nasional.

Sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah menjamin kepada tiap-tiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUD 1945 BAB XIII tentang pendidikan Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran", dan ayat 2 "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang".

Jika mengacu pada pasal 31 UUD 1945 di atas, maka dapat dipahami bahwa pengajaran atau pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diperoleh seluruh warga negara Indonesia, sedangkan pemerintah yang bertugas sebagai aparatur negara memiliki kewajiban memberikan pengajaran dan pendidikan kepada seluruh warga negara dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 31 ayat 2 di atas, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dalam Undang-undang.

Sebagai konsekuensi logis dari pembangunan dunia pendidikan ini adalah munculnya kebutuhan pemerataan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat yang secara langsung akan meningkatkan mutu sumber daya manusia (*human resources*) bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, merupakan salah satu arah pembangunan nasional dalam jangka panjang 2005-2025, sebagaimana yang tertuang dalam UU No 17 tahun 2007 yang menyatakan bahwa kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, mengedepankan

pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ini, merupakan salah satu arah pembangunan nasional. (Ali, 2009: 5).

Pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan suatu investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Begitu pentingnya pembangunan dalam bidang pendidikan, hal ini dikarenakan kebesaran suatu bangsa seringkali diukur dari sejauh mana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Koswara dan Triatna dalam (Riduwan, 2011: 287) beranggapan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka semakin maju pula bangsa tersebut. Ia menambahkan bahwa sumbangan pendidikan terhadap pembangunan bangsa tentu bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi mampu menjadikan pendidikan yang memiliki kualitas atau mutu yang baik. Suatu pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila memiliki input, proses, dan output serta outcome yang baik.

Pendidikan di Indonesia, dewasa ini mengalami kemerosotan dalam hal kualitas atau mutu pendidikan. Berdasarkan laporan UNDP tentang *Human Development Index* (HDI- UNDP) tahun 2000, menempatkan mutu pendidikan Indonesia pada peringkat ke 109 dunia. Tahun 2004 peringkat tersebut turun menjadi 111, kemudian tahun 2005 naik satu poin menjadi peringkat ke 110 dari 177 negara. Rendahnya mutu pendidikan Indonesia ini diperkuat oleh hasil Survey Political and economic Risk Consultant (PERIC) yang menempatkan mutu pendidikan Indonesia berada pada urutan paling rendah yaitu ke 12 dari 12 negara di Asia (Suryadi, 2009: 1). Mohammad Ali (2009: 6), menambahkan bahwa berdasarkan UNDP 2007 Indonesia menempati urutan ke 7 dari 10 negara pada peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara-negara di Asean setelah Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Indonesia, Laos, Kamboja dan Myanmar.

Jika mengacu pada hasil laporan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dan jauh dari apa yang diharapkan. Rendahnya mutu pendidikan ini menunjukkan kegagalan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kegagalan dalam pencapaian tujuan pendidikan tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang datang dari dalam maupun dari luar pendidikan, di samping dunia pendidikan saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Adapun faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam (dunia pendidikan) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Faktor internal bisa berupa kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dan profesional dibidangnya, minimnya sarana dan prasarana pembelajaran, lemahnya metodologi pembelajaran yang digunakan dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tujuan pendidikan termasuk didalamnya adalah masalah manajemen atau pengelolaan lembaga pendidikan yang masih semerawut dan tidak tertata rapih.

Sedangkan faktor yang datang dari luar (eksternal) adalah berupa kebijakan pemerintah yang masih kurang memperhatikan dunia pendidikan seperti masalah kesejahteraan guru sebagai seorang pendidik yang menentukan masa depan bangsa dalam mencetak generasi yang berkualitas masih jauh dari apa yang diharapkan. Walaupun pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan, namun kenyataan menunjukkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Di samping itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat dalam ketercapaian tujuan pendidikan yang ditentukan.

Eti Rochaety (2006: 58 - 61), menyebutkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi kondisi pendidikan adalah 1) dampak manajemen yang sentralistik, 2) Sumber daya manusia, dan

3) pengelolaan manajemen dan organisasi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional adalah 1) proses globalisasi, 2) keadaan politik dan sosial budaya, serta 3) kemajuan IPTEK.

Sementara itu, tantangan nasional muncul dari dunia ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Pembangunan ekonomi saat ini nampaknya belum beranjak dari dunia krisis sejak tahun 1997/1998. Dalam dunia sosial kemasyarakatan, semakin meningkatnya kerusuhan, konflik antar darah dan berbagai kondisi negative lainnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan budaya global saat ini justru telah mengikis berbagai budaya asli bangsa, khususnya budaya daerah. Semua kondisi ini menantang dunia pendidikan untuk dapat menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan dan membawa Indonesia pada bangsa yang maju dan beradab, hal ini seperti yang diutarakan oleh Riduwan dalam Koswara dan Triatna (2011: 289).

Rendahnya mutu pendidikan tersebut, disinyalir bahwa kendala utama dalam peningkatan mutu pendidikan ini adalah terletak pada proses pengelolaan sekolah dan pembelajaran yang tidak berkembang secara profesional (Suyanto dan M.S Abbas, 2001: 61). Usman, (2008: 57) menambahkan rendahnya mutu pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh buruknya mutu manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan.

Irianto (2011: 93), menambahkan bahwa secara sederhana, permasalahan berat yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaan dengan lima aspek, yaitu 1) aspek peningkatan mutu pendidikan, 2) pemerataan pendidikan 3) efisiensi manajemen, 4) peran serta masyarakat dan 5) akuntabilitas dan citra publik.

Upaya pembenahan untuk mencari jalan keluar dari keterpurukan mutu pendidikan ini harus segera diselesaikan. dan solusi desentralisasi manajemen pendidikan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Secara umum, tujuan desentralisasi manajemen di dalam kehidupan berorganisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal. Dengan adanya desentralisasi manajemen pendidikan, ini berarti bahwa ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam praktik desentralisasi manajemen pendidikan dapat diterapkan di dalam beberapa tingkat dan struktur penyelenggara pendidikan, mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat satuan pendidikan (Irianto, 2011: 94).

Kadir (2012: 247), menyatakan bahwa masalah mutu pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dalam sebuah negara, karena keberhasilan pembangunan bangsa ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, keberadaan sumber daya yang berkualitas ini dapat dihasilkan antar lain lewat pendidikan yang berkualitas. Perkembangan pendidikan selalu mengarah pada hal-hal yang berkualitas maupun kuantitas. Pendidikan akan terus berkembang dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sedang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, masalah mutu pendidikan akan selalu menjadi persoalan dalam pengembangan mutu pendidikan.

Menurut Robinson (1995) seperti yang dikutip oleh Kadir (2012: 247), menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah keluaran atau hasil lembaga pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu: pertama, mutu produk pada lembaga pendidikan yang meliputi hal-hal seperti bahan ajar, jumlah lulusan, persentase kelulusan ujian, alumni yang mengikuti studi lanjut dan alumni yang mendapatkan pekerjaan atau promosi. Kedua, mutu proses yang terkait dengan

hal-hal seperti proses pembelajaran, bimbingan bagi peserta didik, konseling, kordinasi pengembangan bahan ajar dan bahan ujian, jaringan kerja dengan kantor regional di berbagai daerah, sistem registrasi, pengelolaan sistem informasi peserta didik, produksi bahan ajar multimedia, produksi bahan ujian, penjadwalan tutorial, layanan bantuan belajar, distribusi bahan ajar dan penyiaran melalui media massa.

Pembahasan tentang pendidikan erat kaitannya dengan visi, misi, kebijakan, budaya kerja, budaya lembaga serta citra lembaga yang bersangkutan. Hal ini karena masing-masing komponen tersebut akan menjadi landasan dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara membuat standarisasi atau ukuran mengenai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adanya standarisasi mengenai kriteria minimal tentang sistem pendidikan nasional ini, merupakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional. Dalam kaitan ini, kriteria penyelenggaraan pendidikan nasional telah dicanangkan memiliki tujuan untuk mewujudkan: 1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistic, 2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreatifitas dan dialogis, 3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur, 4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, 5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal. 6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan 7) terlaksananya evaluasi, akreditasi, serta sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Fathoni, 2005: 120-121). Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar pendidikan nasional juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas public dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak di antara lapisan masyarakat penyelenggara pendidikan tidak berorientasi pada standar mutu sehingga yang terjadi adalah penghamburan waktu, dana dan tenaga, sehingga pada akhirnya mutu atau kualitas hasil yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau hasil lulusan sekolah menjadi tidak berdaya guna.

Mengingat keragaman budaya, latar belakang dan karakteristik peserta didik sebagai masukan dalam sistem pembelajaran dan di sisi lain ada tuntutan agar proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang bermutu, maka proses pembelajaran harus dipilih, dikembangkan, diterapkan secara fleksibel dan bervariasi yang memenuhi kriteria minimal. Secara konseptual proses pembelajaran yang bersifat fleksibel dan bervariasi perlu diterapkan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan formal, proses pembelajaran lebih banyak terjadi dalam lingkungan kelas dengan sejumlah peserta didik di bawah pembinaan seorang pendidik atau lazim disebut sebagai kelas klasikal.

Perlakuan yang seharusnya adalah bahwa peserta didik merupakan kelompok heterogen yang terdiri atas pribadi yang mempunyai karakteristik, kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu mendapat perlakuan sedemikian rupa sehingga potensi masing-masing pribadi tersebut dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan peserta didik agar mampu membangun diri sendiri berdasarkan rangsangan yang diperolehnya sesuai dengan taraf perkembangan psikis,

fisik, sosial dan emosional memerlukan interaksi aktif antara pendidik dengan peserta didik, antar peserta didik, antara peserta didik dengan lingkungan, dalam suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan kondisi serta nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya.

Oleh karena itu, pengelolaan sekolah dan pembelajaran yang baik serta tertatanya manajemen pendidikan yang rapih akan sangat membantu dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Adanya standarisasi dalam pendidikan juga akan mendorong setiap lembaga satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilaksanakannya. Adapun problematika yang berkaitan dengan mutu pendidikan di daerah penanganannya memang tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Diakui atau tidak, keragaman letak geografis dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat dan bahasa, menuntut adanya pola-pola pelaksanaan pendidikan yang tidak seragam. Keragaman latar belakang lingkungan alam dan pekerjaan, menuntut pula adanya isi dan pola layanan pendidikan yang berbeda (Irianto, 2011: 96).

Penerapan standar sebagai kondisi yang dinamis. Idealnya target yang ditetapkan makin lama, makin tinggi. Dalam beberapa waktu belakangan ini masalah yang sedang sekolah hadapi makin jelas. Ternyata, menerapkan standar nasional pendidikan di Indonesia bukan perkara mudah. Sebagian sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki keterbatasan pemahaman dan keterampilan menerapkan standar. Dengan bergulirnya kebijakan untuk menerapkan standar mutu sumber daya pendidikan tidak berkembang dengan sendirinya.

Dari sini dapat dipahami bahwa keragaman latar belakang sekolah juga dapat mempengaruhi terhadap keragaman visi, misi dan tujuan sekolah tersebut sesuai dengan keadaan sekolah yang bersangkutan. Dan keragaman visi, misi dan tujuan ini, selanjutnya akan mempengaruhi terhadap keragaman kurikulum yang diberikan sekolah terhadap peserta didiknya, sehingga dalam penggunaan metode pembelajarannya pun berbeda. Misalnya, visi, misi dan tujuan sekolah yang terletak di kota, tentu akan berbeda dengan visi, misi dan tujuan sekolah yang berada di daerah pegunungan.

Walaupun tiap satuan lembaga pendidikan memiliki visi, misi dan tujuan sekolah yang berbeda, akan tetapi dalam pembuatan visi, misi dan tujuan sekolah tersebut tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN BAB II Pasal 3).

Adapun permasalahan dan tantangan dalam proses pembangunan pendidikan nasional saat ini adalah sebagaimana yang disebutkan Dodi Nandika (2007), terdapat sembilan masalah dan tantangan utama, yaitu: 1) tingkat pendidikan penduduk masih rendah, 2) dinamika perubahan struktur penduduk belum sepenuhnya teratasi dalam pembangunan pendidikan, 3) kesenjangan tingkat pendidikan, 4) fasilitas pelayanan pendidikan belum tersedia secara merata, 5) kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, 6) pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan lulusan, 7) pendidikan tinggi masih menghadapi kendala dalam mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, 8) manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisien dan 9) anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.

Masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia terutama madrasah pada dasarnya sama dengan masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan umum lainnya seperti sekolah yaitu masalah tuntutan mutu. Begitu pentingnya masalah mutu pendidikan, sehingga

pemerintah turut menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Hal ini seperti yang tertuang dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 2.

Standar Nasional Pendidikan yang secara terperinci diatur dalam peraturan pemerintah (PP) no. 19 tahun 2005 pasal 3. Peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan demikian, tujuan pengaturan standar nasional pendidikan yaitu untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Jaminan mutu perlu dilakukan dalam sistem pendidikan nasional sejak tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dalam otonomi daerah, dunia pendidikan sesungguhnya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan peluang yang mengikutinya. Peluang yang muncul yaitu mengembangkan kreasi-kreasi secara luas tanpa ada intervensi pemerintah pusat dalam peraturan operasional program pendidikan. Sedangkan tantangannya adalah persaingan yang semakin ketat antara madrasah yang menghadapi keragaman budaya, ekonomi, sosial dan politik daerah. Adapun kelemahannya yang muncul yaitu sumber daya manusia yang masih belum profesional. Oleh karena itu diperlukan manajemen mutu berdasarkan kekuatan-kekuatan madrasah tersebut dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkembang subur di kalangan umat Islam termasuk di Indonesia. Menarik untuk dikaji tentang keberadaan madrasah di Indonesia, hal ini dikarenakan madrasah di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan madrasah yang berkembang di dunia Islam pada umumnya yakni Timur Tengah. Jika di Timur Tengah institusi madrasah berkembang untuk menyelenggarakan pendidikan ke-Islaman tingkat lanjut/tinggi, maka di Indonesia tidak demikian. Madrasah di Indonesia sebagai suatu lembaga pendidikan Islam bertujuan memberikan dan mengajarkan materi pelajaran agama mulai dari tingkat dasar sampai menengah (Shaleh, 2006: 23).

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki arus perdebatan antara tradisional dan modernitas, sehingga dapat dikatakan bahwa madrasah di Indonesia adalah merupakan hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (tradisional) yang sudah ada pada satu sisi, dengan pendidikan Barat di sisi lain (Shaleh, 2006: 24). Dalam tulisan-tulisan tentang madrasah selalu dimunculkan istilah modernity. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk perubahan dan dinamika perkembangan pendidikan Islam dari bentuk tradisional hingga modern. Karel A. Stenbrink (1986) mengkaji hal tersebut sebagai bentuk perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Husni Rahim menyatakan bahwa Pendidikan Islam yang berlangsung di Indonesia seperti madrasah ini, merupakan warisan peradaban Islam sekaligus aset bagi pembangunan pendidikan nasional. Sebagai warisan, ia merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya sesuai dengan sistem pendidikan nasional (Rahim, 2001: 3). Namun kenyataan menunjukkan bahwa mutu atau kualitas madrasah berjalan lambat tidak sesuai dengan peningkatan lembaga pendidikan yang diselenggarakan.

Berdasarkan data statistik pendidikan Islam dari Kementrian Agama, jumlah lembaga pendidikan Islam yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia adalah sebanyak 19.762 Raudhatul

Athfal (RA), 21.529 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 13. 292 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 5.648 Madrasah Aliyah (MA). Jumlah tersebut tentu terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan semangat masyarakat untuk memajukan kecerdasan hidup masyarakat sekitarnya. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan Islam berdasarkan hasil penilaian Akreditasi, di peroleh data sebagai berikut: a) untuk lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 9.342 atau 43,4 % lembaga terakreditasi B, dan sebanyak 6.242 atau 28,9% lembaga terakreditasi C, dan 1.873 atau 8,7% lembaga terakreditasi A, serta sisanya sebanyak 4.072 atau 18,9 % lembaga belum terakreditasi, b) untuk lembaga pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah terdapat 5.232 atau 39,4% terakreditasi B, 3.536 atau 26,6% terakreditasi C, sementara yang terakreditasi A sebanyak 1.219 atau 9,2 %., dan sisanya yang belum terakreditasi sebanyak 3.305 atau 24,8%, c) untuk tingkat MA, sebanyak 1.794 atau 31,8% terakreditasi B, sementara yang terakreditasi A sebanyak 429 atau 7,6%, sisanya 1.540 atau 27,2 % terakreditasi C dan 1.885 atau 33,3% belum terakreditasi.

Jika mengacu pada hasil penilaian akreditasi di atas, maka dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat MI sampai MA masih memiliki mutu yang rendah. Ini terbukti dengan masih sangat sedikitnya lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang memperoleh hasil akreditasi dengan nilai A. Ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah pada faktualnya belum memenuhi standar-standar yang diharapkan, mulai dari standar isi sampai kepada standar penilaian pendidikan, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun tahun 2005 pasal 2, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Belum terpenuhinya standar-standar yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti yang terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Abuddin Nata (2003: 170), pendidikan Islam sebagai sebuah proses yang berjalan cepat dan dinamis, termasuk yang paling menghadapi permasalahan. Diantara permasalahan tersebut adalah masalah visi, misi, sasaran dan tujuan pendidikan serta target yang tidak jelas. Hal tersebut menjadikan rendahnya daya saing lulusan yang dihasilkannya.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi standar isi dan standar proses pendidikan di satuan tingkat pendidikan menengah.. Standar isi dan Proses yang dimaksud adalah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005. Apakah implementasi standar pendidikan tersebut ada kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan atau tidak. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus mencari informasi faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Ada beberapa alasan yang mendorong untuk melakukan penelitian ini, *pertama* latar belakang pendidikan penulis yang sedang dilalui yaitu disiplin keilmuan dalam bidang pendidikan Islam. *Kedua*, sebagaimana yang telah diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga masalah pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus, karena berkembangnya Islam sendiri tidak lepas dari peran pendidikan yang begitu besar. *Ketiga*, melihat keadaan pendidikan Islam baik yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat formal maupun nonformal begitu juga dengan lembaga pendidikan Islam baik yang berstatus negeri maupun swasta seperti madrasah masih belum memuaskan jika dilihat dari segi kualitas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Husni Rahim (2005: 35), bahwa pendidikan Islam seperti madrasah jika dilihat dari segi kuantitas perkembangannya sangat pesat, namun dari segi kualitas perkembangannya sangat lambat.

Adapun pintu masuk yang digunakan untuk mengumpulkan data empiris dan aktual dalam rangka menganalisis peningkatan mutu pendidikan yaitu lembaga pendidikan madrasah, lebih

spesifik lagi pada madrasah aliyah. Dalam hal ini madrasah dijadikan objek penelitian dalam rangka mengetahui kondisi pendidikan yang berlangsung di madrasah terutama dalam pelaksanaan standar isi dan standar proses pendidikan serta upaya yang dilakukan pihak madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

KAJIAN TEORI

Posisi Madrasah

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal dan terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia serta telah banyak institusi atau badan yang mendirikan lembaga pendidikan madrasah ini, maka sudah seyogyanya madrasah memerlukan sebuah manajemen yang mengkaji tentang mutu atau kualitas daripada madrasah itu sendiri. Peningkatan madrasah dalam bentuk kuantitas perlu diimbangi dengan peningkatan madrasah dalam bentuk kualitas. Maka dari itu, peningkatan kualitas dan mutu madrasah secara terencana dan berkelanjutan kiranya perlu untuk dilakukan.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah pada kenyataannya masih banyak yang belum memenuhi standar yang diharapkan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun oleh para pengguna layanan jasa pendidikan madrasah. Memang banyak faktor yang mempengaruhi masalah mutu pendidikan madrasah salah satu diantaranya adalah masalah pemeliharaan gedung tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, kemudian kompetensi para guru yang mengajar, dukungan orang tua para murid, kekuatan kepemimpinan seorang kepala sekolah atau madrasah, serta kurikulum yang tepat. Macam-macam faktor tersebut jika diklasifikasikan maka terbagi ke dalam faktor internal dan eksternal.

Madrasah secara teoritis dikaji melalui pengembangan teori pendidikan Islam. Munculnya kritik terhadap pendidikan Islam berkaitan dengan kritik mutu yang rendah, seakan-akan tidak berfungsinya proses manajemen dalam pendidikan Islam. Padahal dalam era global seperti sekarang ini, persaingan lembaga pendidikan Islam semakin nyata dan ketat. Pendidikan Islam pada masa lalu hanya bersaing pada tingkat regional dan nasional. Akan tetapi pada masa sekarang pendidikan Islam harus menghadapi persaingan global. Pada beberapa sekolah di Indonesia sekarang ini tengah diprogramkan model-model pendidikan bertaraf internasional. Sekolah nasional bertaraf internasional ini bukan hanya dalam lembaga pendidikan umum, melainkan pula dalam lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Berdasarkan orientasi seperti ini, maka lembaga pendidikan Islam yang bermutu tinggi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat global yang dapat eksis dalam arena persaingan. Sebab, jika lembaga tersebut tidak bermutu tinggi, maka akan ditinggalkan oleh masyarakat yang pada akhirnya akan mengalami jauh ketertinggalan.

Mutu madrasah di Indonesia dapat diukur melalui pemenuhan standar pendidikan nasional yang menggunakan instrumen akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Melalui BAN S/M maka dapat diketahui tingkat pencapaian mutu suatu sekolah atau madrasah dengan predikat A, B, C atau tidak terakreditasi. Instrumen akreditasi yang dilakukan secara berkala digunakan sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi sekolah atau madrasah. Walaupun banyak kalangan menilai bahwa hasil akreditasi belum dapat dipercaya sepenuhnya sebagai gambaran mutu sekolah/madrasah, karena keputusan penilaian ini tidak terlepas dari unsur subjektivitas asesor yang melakukan visitasi ke sekolah atau madrasah tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penjaminan mutu secara internal atau penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal baik dari struktural lembaga penyelenggara pendidikan maupun dari

pihak lingkungan sekolah yang dapat memastikan berjalannya sistem mutu di sekolah atau madrasah.

Madrasah agar dapat berkembang dalam era persaingan global ini, maka perlu dikelola dengan baik melalui penerapan teori-teori manajemen mutu. Komponen-komponen madrasah sebagai sistem pendidikan yang perlu dikelola mutunya adalah mengenai tujuan dari sekolah tersebut, kurikulum yang digunakan, guru, siswa, metode, strategi, media, sarana prasarana, evaluasi, lingkungan, dan kepemimpinan. Semua komponen dikelola dengan baik agar mutu yang diharapkan dapat terlaksana sesuai apa yang direncanakan. Dalam komponen-komponen tersebut banyak menyimpan masalah tergantung pada variasi-variasi yang dimiliki oleh madrasah/sekolah di berbagai daerah. Madrasah perlu segera melakukan adaptasi dan perubahan menuju kemajuan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, tanpa harus meninggalkan jatidiri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam tetapi di samping madrasah harus mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu atau kualitas lembaga pendidikan. Untuk merealisasikan hal ini, kiranya diperlukan manajemen mutu madrasah dan model pengembangannya.

Kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mendorong masyarakat muslim untuk mewujudkan cita-citanya melalui proses pendidikan Islam yang bermutu. Timbulnya berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan sejalan dengan adanya perubahan zaman yang semakin hari bertambah kompleks. Adanya tuntutan perubahan zaman ini tidak akan mampu diatasi jika sumber daya manusia yang ada masih rendah. Oleh karena itu perlu dibangun sumber daya manusia sebagai prioritas program unggulan lembaga pendidikan Islam. Hal ini pada gilirannya menuntut manajemen pendidikan Islam yang berfokus pada mutu sehingga memiliki hasil output dan outcome pendidikan yang relevan dengan konteks tuntutan kebutuhan zaman.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam seperti madrasah adalah membuat madrasah model. Cara ini ditempuh dengan pemikiran bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah yang jumlahnya cukup banyak tidak mungkin dilakukan secara sekaligus karena keterbatasan dana dan sumber daya lainnya. Untuk itu ditempuh cara imbas yaitu membuat madrasah model yang diharapkan akan mengimbas pada madrasah disekitarnya (Rahim, 2001: 165).

Madrasah model adalah madrasah negeri yang memiliki standar tertentu dari segi sarana dan prasarana, jumlah dan kualifikasi tenaga guru, serta siswa yang terseleksi sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan intensitas yang tinggi. Dengan intensitas pembelajaran yang tinggi itu akan dihasilkan lulusan yang tinggi mutunya.

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan madrasah model ini adalah belum adanya kriteria yang jelas baik dari segi program, ketenagaan, sarana prasarana maupun sumber daya pendidikan lainnya. Meskipun demikian upaya perintisan untuk mengembangkan madrasah model ini sudah dimulai dengan melengkapi sumber daya pendidikan pada madrasah yang dipilih.

Masyarakat saat ini semakin rasional dan semakin membutuhkan jasa pendidikan yang bermutu. Hal ini perlu segera disadari oleh para pengelola pendidikan. Suatu lembaga pendidikan jika ingin menjadi berkualitas dan memiliki mutu yang tinggi, maka perlu dikelola dengan baik. Seluruh komponen yang terkait dengan mutu pendidikan perlu dikelola. Manajemen mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan output pendidikan yang bermutu tinggi. Kebijakan itu dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam proses perencanaan, peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan. Sebab, kemerosotan mutu lembaga pendidikan

Islam saat ini terkesan hanya karena diselenggarakan tanpa perencanaan, peningkatan dan pengendalian mutu yang sesuai dengan konsep manajemen mutu pendidikan.

Pendidikan Islam sebagai sebuah proses yang berlangsung cepat dan dinamis termasuk yang paling banyak mengalami problematika. Masalah visi, misi saran dan tujuan pendidikan dengan tidak adanya target yang jelas, mengakibatkan lulusannya tidak jelas pula. Ilmu kurang dikuasai sehingga dipasar kerja tidak mampu bersaing. Padahal persaingan yang kompetitif tidak dapat dihindari lagi. Kekalahan bersaing mengarah pada ketidak berdayaan dan akhirnya menjadi tidak percaya diri dan marginal.

Masalah pendidikan timbul dalam komponen-komponen pendidikan Islam, seperti tenaga pendidik masih jarang memaknai profesi sebagai tugas pokok yang harus dilaksanakan secara profesional. Sumber daya tenaga pendidik rata-rata masih di bawah kategori bibit unggul. Fakta menunjukkan, bahwa di madrasah muatan kurikulum ilmu umum penuh dan ditambah ilmu agama. Akan tetapi, tenaga guru yang tersedia menunjukkan sebaliknya yaitu guru dalam bidang keahlian ilmu agama penuh, sedangkan dalam keahlian ilmu umum kurang. Akibatnya, guru agama mengajarkan ilmu umum seperti matematika, fisika, biologi dan ilmu-ilmu lainnya. Materi yang diampu tidak sesuai dengan latar belakang basis keilmuan tersebut, sehingga materi kurang dikuasai. Hasilnya kurang berbobot, karena terjadi salah kamar dalam mengajar; tidak sesuai keilmuan yang menjadi latar belakang pendidikan guru tersebut. Dalam hal ini Husni Rahim (2001: 95), membagi guru ke dalam tiga macam, pertama, guru layak, guru layak tapi salah kamar dan ketiga guru layak dan cocok.

Menurut Muzammil Qomar (T.tp: 43), Eksistensi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah sesuai dengan perkembangan zaman mengalami berbagai perkembangan yaitu dengan banyaknya lembaga pendidikan madrasah, sekolah umum, perguruan tinggi, dan lembaga kursus serta pelayanan umat. Masing-masing lembaga tersebut secara kuantitatif semakin berkembang dari tahun ke tahun dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun sayangnya secara mutu dan kualitas masih jauh dari apa yang diharapkan. Padahal masalah mutu dan kualitas bagi lembaga penyelenggara pendidikan haruslah diperhatikan. Karena lembaga pendidikan yang tidak mengorientasikan pada pencapaian mutu, maka cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh konsumennya. Namun sebaliknya, lembaga pendidikan yang menjadikan mutu sebagai orientasi dan standar kualitasnya, maka akan dicari konsumen (Arief, 2005: 21).

Upaya pengelolaan maupun pengembangan lembaga pendidikan Islam menjadi berkualitas merupakan suatu keharusan dan beban kolektif bagi para penentu kebijakan pendidikan Islam. Mereka memiliki kewajiban untuk merumuskan strategi dan mempraktikannya guna memajukan pendidikan Islam. Perumusan strategi itu juga akan mempertimbangkan eksistensi lembaga pendidikan Islam secara riil dan orientasi pengembangannya (Arief, 2005: 22).

Walaupun begitu banyak lembaga pendidikan Islam telah didirikan, tampaknya minat masyarakat muslim terhadap lembaga pendidikan Islam belakangan ini telah bergeser dari pertimbangan ideologis menuju pertimbangan rasional. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muzamil Qomar dalam *Manajemen Pendidikan Islam*. Ia menambahkan bahwa orang tua siswa tidak serta merta memasukkan putra-putrinya ke madrasah atau sekolah Islam hanya karena kesamaan identitas keIslaman. Akan tetapi, mereka melakukan seleksi dan beberapa pertimbangan.

Harus diakui bahwa kurang tertariknya masyarakat dalam memilih lembaga-lembaga pendidikan Islam, sebenarnya bukan karena telah terjadi pergeseran nilai atau ikatan keagamaannya mulai memudar, melainkan karena sebagian besar lembaga pendidikan Islam

tersebut kurang menjanjikan dan kurang responsif terhadap tuntutan dan permintaan masyarakat saat ini maupun yang akan datang.

Paling tidak ada tiga alasan yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan untuk menyekolahkan anaknya. Pertama, cita-cita atau gambaran hidup masa depan. Kedua, nilai-nilai (agama), ketiga, status sosial (Fajar, 1998: 8). Semakin terpelajar masyarakat, semakin beragam aspek yang menjadi pertimbangannya dalam memilih lembaga pendidikan untuk anak-anaknya. Dan sebaliknya semakin awam masyarakat semakin sederhana pertimbangan-pertimbangannya dalam memilih lembaga pendidikan. Bagi masyarakat terpelajar, ketiga aspek tersebut dapat dipertimbangkan secara objektif. Tetapi jika tidak terpenuhi ketiganya, misalnya pendidikan agamanya dinilai kurang, niscaya mereka akan mencari cara lain misalnya dengan mengundang guru privat. Akan tetapi masyarakat awam biasanya tidak memiliki pertimbangan yang jelas. Boleh jadi semata-mata karena faktor agama, yaitu agar anaknya berbudi pekerti luhur atau karena faktor biaya pendidikannya terjangkau, dan sebagainya.

Pernyataan tersebut dibuktikan oleh kenyataan di masyarakat, ketika ada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memenuhi ketiga kriteria di atas, akan semakin diminati oleh masyarakat terutama masyarakat muslim yang terpelajar. Tetapi sebaliknya, banyak lembaga pendidikan Islam yang semakin meminggir posisinya karena tidak menjanjikan apa-apa. Ini berarti bahwa masyarakat sebenarnya sedang menunggu lahirnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.

Kelembagaan pendidikan Islam sebagai subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya harus selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa bersikap demikian, barangkali agak sulit untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya bahkan yang terjadi lembaga pendidikan Islam dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural (Hasbullah, 1996: 39). Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan haruslah sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat.

Masalah rendahnya mutu pendidikan Islam akhirnya menjadi akhir penilaian umum. Standar mutu umumnya dinilai dari mutu tenaga pengajar dan mutu kelulusan yang dapat diserap oleh lapangan kerja atau diterima ditingkat lanjutnya secara bersaing. Namun demikian, lulusan itu dihasilkan dari proses pendidikan yang dikelola dengan baik. Fenomena lainnya yang muncul. Tumbuhnya lembaga pendidikan Islam nampaknya belum diikuti dengan meningkatkan manajemen yang baik, sehingga secara kualitas masih mengalami gejala kemerosotan. Kemerosotan kualitas lembaga pendidikan Islam ini terkesan hanya karena mereka berdiri tanpa perencanaan yang matang.

Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan menurut Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 Bab I Pasal 1 ayat 17, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan meliputi berbagai standar yang ada didalamnya, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian (Mulyasana, 2001: 147).

Pendidikan yang bermutu tidak akan tercapai apabila tidak ada kriteria atau dasar yang jelas untuk dijadikan acuan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, untuk mencapai atau mewujudkan pendidikan yang bermutu, diperlukan suatu kriteria atau ukuran untuk menilai sejauh mana lembaga penyelenggara pendidikan dapat dikatakan bermutu atau

tidak. Pendidikan yang bermutu akan sangat membantu sekali dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas tahun 2003, Bab II, pasal 3).

Sejalan dengan itu, fungsi dari Standar nasional pendidikan ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan adanya standar nasional pendidikan, diharapkan akan membantu setiap satuan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu lulusannya.

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum (isi materi) merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum, yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang disertai dengan proses pembelajaran yang aktif merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tinjauan Tentang Standar Isi

1. Pengertian Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran (Mulyasa, 2006: 24). Hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 5 ayat 1 PP no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang menyatakan bahwa standar isi pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan pada pasal 5 ayat 2, dinyatakan bahwa Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik (LeKDiS, 2005: 14).

Hal senada juga terdapat pada PP no. 32 tahun 2013 sebagai perubahan pertama atas Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pada pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lebih lanjut, PP no 32 tahun 2013 pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa Standar Isi mencakup kriteria: a) ruang lingkup materi dan b) tingkat Kompetensi. Pada ayat (2) disebutkan bahwa Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk satuan pendidikan. Sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Peserta Didik pada setiap tingkat kelas. Selanjutnya pada ayat (4) menyatakan Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa standar isi merupakan keseluruhan isi atau materi pembelajaran yang dipelajari oleh setiap satuan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Dalam sebuah proses pembelajaran, isi sebuah materi pembelajaran (rencana pelajaran) merupakan suatu hal yang urgen. Suatu pembelajaran tidak akan berlangsung atau terselenggara apabila didalamnya tidak ada materi yang disampaikan atau materi yang dipelajari. Istilah lain dari isi materi atau rencana pelajaran ini disebut juga dengan kurikulum.

Mulyasa (2010: 4), menyatakan bahwa salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum. Hal ini dikarenakan bahwa kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan baik oleh pengelola maupun oleh penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Tinjauan Tentang Standar Proses

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini berarti dalam standar proses, berlangsung suatu kegiatan pembelajaran. Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan (Sanjaya, 2009: 49).

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 merupakan salah satu acuan utama bagi satuan Pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan

2. Pengertian dan Fungsi Standar Proses

Standar proses adalah salah satu diantara delapan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Mulyasa, 2009: 25). Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang standar proses (Mulyasa, 2009: 25).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6, disebutkan bahwa Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan

Dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti suatu standar dalam pengelolaan proses pendidikan harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di manapun lembaga pendidikan itu berada baik di perkotaan maupun pedesaan secara nasional.

Kedua, standar proses dikaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran itu berlangsung pada setiap satuan pendidikan yang dilakukan oleh setiap guru, baik guru kelas maupun guru mata

pelajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan harapan. Kondisi ketidakmerataan kualitas pendidikan disebabkan karena kualitas pembelajaran yang tidak standar. Misalnya kondisi bangunan fisik berikut fasilitas sekolah yang ada di kota tidak sama dengan sekolah yang ada di pedesaan. Sekolah-sekolah yang ada di kota dengan dukungan orang tua dan masyarakat, dengan sarana dan prasarana yang memadai akan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih bagus dibanding sekolah-sekolah yang ada di pedesaan dengan sarana yang terbatas, dengan dukungan masyarakat dan orang tua yang mungkin rendah.

Ketiga, Standar proses pendidikan diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian standar lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan. Karena itu standar proses pendidikan bisa dirumuskan dan diterapkan manakala telah tersusun standar kompetensi lulusan.

Dari pengertian tentang standar proses pendidikan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam standar proses pendidikan terdapat beberapa fungsi. secara umum Standar Proses Pendidikan (SPP) sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mencapai kompetensi lulusan yang telah ditentukan.

3. Komponen Standar Proses Pendidikan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka standar proses pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan. Adapun penjelasan komponen-komponen tersebut seperti disebutkan di bawah ini:

a. Perencanaan Proses Pembelajaran.

E. Sunarya (2000: 35), menyebutkan bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana dan bagaimana cara melakukannya. Pendapat lain mengungkapkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Husaini Usman yang menyebutkan perencanaan adalah suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut Handoko (2003: 51), perencanaan meliputi pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Adapun bentuk-bentuk perencanaan itu sangat beragam, tergantung dari segi mana kita memandangnya. Apakah dari aspek ruang lingkup, jangka waktu, dari segi materi, dari segi sudut daerah atau dari sudut spesifikasinya. Perencanaan jika dilihat dari segi ruang lingkup, maka terbagi menjadi empat; rencana kebijaksanaan, rencana program, rencana proyek dan rencana operasi. Jika dilihat dari segi jangka waktu, maka terbagi menjadi empat; rencana jangka lama, rencana jangka panjang, rencana jangka sedang dan rencana jangka pendek. Jika dilihat dari sudut materi, maka perencanaan terbagi menjadi; rencana personel, rencana finansial, rencana pendidikan, dan rencana logistik. Sedangkan jika perencanaan dilihat dari sudut daerah, maka dapat dibagi menjadi; rencana pedesaan atau antarpedesaan, rencana perkotaan atau antar perkotaan, rencana daerah atau antardaerah, dan rencana nasional atau internasional. Terakhir, jika

perencanaan dilihat dari spesifikasinya, maka dapat dibedakan menjadi; rencana umum dan rencana khusus.

Dalam melaksanakan setiap bentuk perencanaan, setidaknya mengacu pada tiga pendekatan yaitu: pendekatan sosial, pendekatan tenaga kerja, dan pendekatan terpadu. Pendekatan sosial didasarkan pada kebutuhan masyarakat saat ini dengan menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pemerataan kesempatan belajar. Adapun pendekatan ketenagakerjaan yaitu pendekatan yang mengutamakan keterkaitan kelulusan peserta didik dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan pendekatan terpadu menitikberatkan pada perpaduan segala unsur baik internal maupun eksternal.

Perencanaan dalam suatu kegiatan harus bersifat rasional agar mudah dipahami dan terjangkau dalam proses pencapaiannya. Begitu juga perencanaan harus bersifat sistemik agar dalam menetapkan keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama dan supaya jelas dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan, yaitu: 1. langkah-langkah perencanaan yang meliputi a) pemilihan tujuan/sasaran organisasi, b) tujuan/sasaran ditetapkan untuk setiap sub-unit organisasi, divisi, departemen dan sebagainya, c) program ditentukan untuk mencapai tujuan dengan cara yang sistematis. 2. Proses perencanaan yang meliputi: a) merumuskan tujuan dengan jelas, b) mengidentifikasi dan menganalisis data terkait masalah, c) mencari dan menganalisis alternatif pemecahan masalah, d) mengomparasikan alternatif yang ditemukan antara alternatif yang tepat guna, berhasil guna dan praktis, e) mengambil keputusan, dan f) menyusun rencana kegiatan. 3. Prinsip-prinsip perencanaan, yang meliputi; a) mengacu pada tujuan yang ingin dicapai, b) mempertimbangkan efisiensi, c) praktis dapat dilaksanakan, d) mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada, e) komprehensif/berwawasan luas, integrasi/ terpadu dengan semua komponen yang terkait, f) fleksibel, dan g) jelas (Mulyono, 2010: 63).

Proses perencanaan pada lembaga pendidikan baik di sekolah maupun madrasah dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M). RKS/M merupakan bentuk perencanaan yang berusaha mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi sekolah/madrasah. Sesuai dengan teori perencanaan yang telah disebutkan, dalam RKS/M idealnya memperhatikan langkah-langkah dalam proses perencanaan dan mengimplementasikan kegiatan perencanaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) rencana kerja yang disusun oleh sekolah/madrasah bersama dengan komite sekolah/madrasah mengacu pada kebutuhan madrasah dan aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengemukakan apa yang dibutuhkan oleh madrasah serta apa yang menjadi harapan masyarakat sekitar terhadap madrasah (Muhaimin dkk, 2012: 51). Dengan adanya RKS/M yang jelas, maka semua pihak baik warga sekolah maupun orang tua siswa dan masyarakat sekitar akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sekolah/madrasah dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki keadaan sekolah/madrasah.

Seorang guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran harus lebih dulu membuat perencanaan pembelajaran. Hal ini penting karena di samping sebagai salah satu prasyarat indikator keberhasilan di dalam tugas profesionalnya juga pembelajaran merupakan usaha membentuk manusia yang baik. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, Majid menyatakan bahwa: "perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan" (Majid, 2008: 17).

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana program pembelajaran yang telah disusun oleh guru yang dilakukan dalam satu kali pertemuan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Seorang guru pada awal kegiatan pembelajaran harus melakukan kegiatan-kegiatan pendahuluan, yang meliputi:

- 1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
- 2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
- 3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
- 4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti yang dilakukan meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: (1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam topik/tema materi yang akan dipelajari dan belajar dari aneka sumber; (2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain; (3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; (4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan, (5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

2) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru: (1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; (2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan kegiatan lainnya untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; (3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; (4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; (5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; (6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; (7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok; (8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; (9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

3) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: (1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. (2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. (3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah

dilakukan. (4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar.

Pada tahapan pelaksanaan pembelajaran ini, seorang guru harus mampu memilih sumber-sumber belajar dan strategi membelajarkannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Oliva sebagai berikut; “*Implimentation of intruction is seen as including the selection of resources and the selection on implementation of teaching strategy*”(Oliva, 1984: 83).

Pernyataan tersebut diatas dapat diterjemahkan : ” pelaksanaan pengajaran yang terlihat itu sama halnya memasukkan pemilihan sumber daya dan pelaksanaan strategi pegajaran” Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran meliputi memilih sumber-sumber belajar dan strategi pembelajarannya. Dengan demikian seorang guru dituntut harus mampu menyajikan sumber-sumber pembelajaran yang relevan serta menentukan strategi atau pengelolaan lingkungan belajar paerta didik dengan harapan proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kualitas pembelajaran seorang guru sangat strategis sebagai ujung tombak terjadinya perubahan (*the agen of change*) dari yang belum bisa menjadi bisa, dari belum menguasai menjadi menguasai, dari belum mengerti menjadi mengerti, melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan kualitas pembelajaran atau pendidikan bergantung pula pada kualitas guru dalam proses pembelajaran (Munthe, 2009: 1).

Sejalan dengan kualitas pembelajaran Djamarah melukiskan hubungan seorang guru dengan peserta didik adalah padanan frase yang serasi, seimbang dan harmonis, hubungan keduanya dalam relasi kejiwaan yang saling membutuhkan, dalam perpisahan raga, jiwa mereka bersatu sebagai dwi tunggal, Guru pembelajaran dan peserta didik belajar dalam proses interaksi edukatif yang menyatukan langkah mereka kesatu tujuan yaitu kebaikan, dengan kemuliaannya guru meluruskan pribadi peserta didik yang dinamis agar tidak membelok dari kebaikan (Djamarah, 2008: vi).

Dengan demikian di dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang edukatif guru agama Islam harus berusaha agar peseta didik aktif dan kreatif secara maksimal, guru tidak harus terlena dengan gaya pembelajaran yang tradisional, berbagai pendekatan komunikasi efektif dijalankan mulai dari awal pelajaran sampai menutup pelajaran.

Syaiful Bahri Djamarah (2008: 5), menyatakan kegiatan pembelajaran tidak lain adalah menanamkan sejumlah norma ke dalam jiwa peserta didik. Kegagalan pembelajaran dapat merusak satu generasi masyarakat.

c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup yang dilaksanakan oleh guru pada akhir kegiatan pembelajaran adalah:

- 1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.
- 2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.
- 3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.
- 5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Dalam kegiatan penutup dalam pembelajaran, pada dasarnya merupakan pemberian stimulus-stimulus kepada peserta didik, agar terjadinya respons yang positif pada diri peserta didik tersebut. Kesiapan dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses demi proses dalam pembelajaran akan mampu menimbulkan respons yang baik terhadap stimulus yang mereka terima dalam proses pembelajaran. Respons akan menjadi kuat jika stimulusnya juga kuat.

Ulangan-ulangan terhadap stimulus dapat memperlancar hubungan antara stimulus dan respons, sehingga respons yang ditimbulkan akan menjadi kuat. Hal ini akan memberi kesan yang kuat pula pada diri peserta didik, sehingga mereka akan mampu mempertahankan respons tersebut dalam memorynya. Pada intinya merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran (Supiatin, 2010: 70).

Hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi lebih baik kalau dapat menghasilkan hal-hal yang menyenangkan. Efek menyenangkan yang ditimbulkan stimulus akan mampu memberi kesan yang mendalam pada diri peserta didik, sehingga mereka cenderung akan mengulang aktivitas tersebut. Dalam interaksi edukatif diharapkan semua yang terlibat didalamnya berperan aktif sehingga tercipta komunikasi timbal balik antara guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik (Sardiman, 2009: 207).

Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu strategi manajemen kegiatan pembelajaran dan berupaya untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Pengelolaan pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur (memanajemen, mengendalikan) aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan, diakhiri dengan penilaian (Rohani, 2014: 2).

Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak pembelajar, dengan peserta didik sebagai subjek pokoknya (Supiatin, 2010: 44). Proses pembelajaran berarti mengedepankan proses interaksi dua arah, bukan sekedar *transfer knowledge*. Padahal tujuan belajar secara esensial, disamping untuk mendapatkan pengetahuan, juga untuk meningkatkan ketrampilan dan pembinaan sikap mental (Sudirman, 2009: 53).

Pernyataan tersebut di atas mengandung pengertian bahwa pembelajaran bukanlah konsep yang sederhana melainkan bersifat kompleks. Pembelajaran itu berkaitan erat dengan pengembangan potensi manusia atau peserta didik, perubahan, pengembangan dimensi-dimensi kepribadian peserta didik. Hal serupa diungkapkan pula oleh Hamalik yang menyatakan bahwa ada berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berinteraksi satu sama lain meliputi: (1) tujuan pembelajaran; (2) peserta didik; (3) tenaga kependidikan khususnya guru; (4) perencanaan pembelajaran; (5) strategi pembelajaran; (6) media pembelajaran; (7) evaluasi pembelajaran (Hamalik, 2008: 77).

Proses pembelajaran ditandai oleh adanya interaksi antara komponen pembelajaran tersebut. Misalnya komponen guru berinteraksi dengan komponen peserta didik, metode, media, peralatan dan unsur-unsur tenaga kependidikan lainnya. Komponen peserta didik berinteraksi dengan komponen guru, metode, media, perlengkapan dan lingkungan kelas yang terarah pada pencapaian tujuan pembelajaran, demikian seterusnya. Komponen dalam pembelajaran saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Pada dasarnya dalam pelaksanaan proses pengelolaan pembelajaran dapat terselenggara dengan lancar, efisien, dan efektif berkat adanya interaksi yang positif, konstruktif dan produktif antara berbagai komponen yang terkandung di dalam sistem pembelajaran tersebut.

Kondisi pembelajaran yang efektif yang dapat menentukan keberhasilan belajar peserta didik adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif, karena peserta didik sebagai subjek didik dan mereka sendiri yang melaksanakan belajar, menarik minat dan perhatian peserta didik, membangkitkan motivasi peserta didik, prinsip individualitas dan peragaan dalam pembelajaran (Supiatin, 2010: 46).

Suatu lembaga pendidikan jika ingin menghasilkan output atau lulusan yang berkualitas, tentu harus memperhatikan proses yang dikerjakan dalam mencetak lulusan tersebut. Lembaga pendidikan seyogyanya tidak begitu saja membiarkan proses pembelajaran di lingkungan belajarnya berlangsung tanpa ada perencanaan, penilaian dan pengawasan yang baik dan teliti.

Perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, harus disertai dengan pelaksanaan sebagaimana yang telah direncanakan. Rencana yang telah disiapkan secara matang tanpa disertai dengan pelaksanaan, merupakan wujud dari teori belaka. Begitu juga sebaliknya, suatu pelaksanaan pembelajaran tanpa ada perencanaan yang baik, maka secara tidak langsung ia telah merencanakan suatu kegagalan.

Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan kedua-duanya harus dilaksanakan. Tidak hanya perencanaan dan pelaksanaan saja yang harus diperhatikan, proses penilaian dan pengawasan juga akan sangat membantu dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran tanpa ada penilaian dan pengawasan, maka dapat dipastikan pembelajaran tersebut akan berlangsung menjadi tidak efektif. Dikatakan tidak efektif, karena dalam pembelajaran sudah seharusnya terdapat suatu.

c. Penilaian dan pengawasan.

Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk menjadi bahan evaluasi guru dan pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikannya melalui standar proses, sedangkan pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengawasi proses pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung supaya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Dalam proses penilaian hasil pembelajaran guru dapat menggunakan berbagai teknik dan cara penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Adapun yang dimaksud dengan penilaian dan pengawasan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang BNSP pasal 22 disebutkan bahwa Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Sedangkan teknik penilaian yang digunakan oleh guru tersebut dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Adapun Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Dalam proses peningkatan mutu pendidikan, fungsi pengawasan sangatlah penting. Perencanaan mutu yang matang dan pelaksanaan rencana yang tersistematis tidak akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa diikuti dengan proses pengawasan. Sedikitnya ada empat macam fungsi dari pengawasan yang dikemukakan oleh Dunn (2000: 510), yaitu: Eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. Fungsi eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan termasuk didalamnya hambatan dan kesulitan yang dihadapi.

Fungsi akuntansi artinya melalui pengawasan dapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Sedangkan fungsi pemeriksaan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara kerja nyata dengan rencana yang dirumuskan. Dan fungsi kepatuhan bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kepatuhan para pelaksana tugas sehingga dapat diketahui tingkat kedisiplinan kerja pegawai (Engkoswara dan Komariah, 2012: 275).

Merupakan suatu hal yang keliru dan menyalahi aturan apabila proses pengawasan atau mekanisme kerja pengawas hanya memantau, memeriksa dan hanya melaporkan saja apa yang terjadi di lapangan. Hal ini tidak sesuai dengan esensi pengawasan yakni proses pembinaan. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang dalam prosesnya terjalin sebuah pembinaan antara seorang pengawas/supervisor dengan petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan pekerjaan.

Terdapat banyak istilah yang berkaitan dengan pengawasan (*controlling*), seperti *monitoring*, *correcting*, *evaluating*, dan *supervision*. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati terus menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk, serta pengawasan juga mengandung arti pembinaan dan pelurusan terhadap ketidaktepatan dan kesalahan.

Proses pengawasan meliputi tiga tahap yaitu: 1) menetapkan standar pelaksanaan, 2) pengukuran pelaksanaan, 3) menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Dalam menetapkan standar pelaksanaan dimulai dari menetapkan tujuan secara spesifik dan mudah diukur. Tujuan atau sasaran dan cara mencapai tujuan tersebut merupakan standar dan metode kerja yang dapat digunakan untuk proses pengukuran. Proses pengukuran dilakukan secara berulang-ulang bisa melalui pengamatan langsung atau melalui instrumen-instrumen yang berisi indikator efektifitas kerja. Hasil dari pengukuran ini berguna sebagai informasi bisa digunakan untuk menetapkan hasil apakah rencana telah terlaksana atau belum, atau digunakan untuk membandingkan antara standar dengan keadaan nyata di lapangan.

Adapun tujuan dari pengawasan secara umum adalah untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasil dari pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Sedangkan menurut Fattah (1996: 103) sebagaimana yang dikutip Engkoswara, menyebutkan bahwa tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah untuk membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai syarat-syarat sistem. Harsono, (1996: 36) menyatakan tujuan pengawasan pendidikan adalah untuk mendeteksi sedini mungkin segala bentuk penyimpangan serta menindaklanjutinya dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pendidikan. Prioritas pendidikan adalah yang dimaksud adalah pemerataan kesempatan belajar, relevansi dan peningkatan mutu.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, yang mengandalkan kekuatan penafsiran makna tentang pengembangan manajemen mutu yang terjadi pada madrasah Aliyah Negeri. Data yang dikumpulkan bergerak dari fungsi manajemen yaitu perencanaan mutu madrasah, pelaksanaan, pengawasan, jaminan mutu dan tindakan perbaikan mutu berkelanjutan yang diyakini efektif oleh pihak madrasah yang bersangkutan. Fungsi manajemen tersebut dipahami dalam konteks pengembangan visi, misi, dan tujuan madrasah; kurikulum; sumber daya manusia, sarana prasarana dan evaluasi mutu hasil pembelajaran. Kompetensi dan kewenangan memobilisasi

warga madrasah terletak pada kepala sekolah sebagai top leader. Maka model kepemimpinan kepala madrasah dalam menjalankan sistem manajemen mutu dipahami sebagai faktor dominan berjalannya sistem dan terjadinya peningkatan mutu madrasah berkelanjutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model kebijakan. Pendekatan kebijakan dalam penjaminan mutu madrasah untuk memahami pihak-pihak terkait dalam meningkatkan mutu madrasah. Sebab dalam aspek birokrasinya madrasah berkaitan dengan suatu kebijakan tertentu yang dapat mempermudah atau bahkan sebaliknya mempersulit jalannya sistem penjaminan mutu madrasah. Aspek yang diteliti dalam pendekatan kebijakan yaitu kebijakan kepala madrasah dalam mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada; kebijakan Kanwil kementerian Agama Banten dalam rekrutmen dan penempatan guru dan kepala sekolah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Gambaran tentang lokasi penelitian secara komprehensif dipahami dalam konteks makna-makna peristiwa, kejadian, dan fenomena yang muncul dalam sistem pendidikan madrasah Aliyah Negeri (MAN). Unit MAN dijadikan pintu masuk untuk memahami sistem manajemen mutu dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu meningkatkan citra mutu pendidikan Islam dapat dicapai dengan meningkatkan mutu MAN secara menyeluruh yang kemudian dijadikan model dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah lainnya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data. Wawancara dilakukan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab untuk menggali alam pikiran dan wawasan informan tentang pengembangan manajemen mutu madrasah. Wawancara yang dilakukan nonstruktur, sehingga memungkinkan informan yang diwawancarai sebagai subjek yang aktif mengkonstruksi dunia kognitifnya, sedangkan peneliti berusaha menangkap alam makna tersebut (Mulyana, 2007: 35). Oleh karena itu, subjek penelitian bukan hanya diharapkan menjawab secara jujur, melainkan secara kreatif menjabarkan secara luas dan dalam. Namun demikian, untuk mengarah pada tema penelitian, maka dipandu dengan pedoman wawancara yang disusun peneliti walaupun sifatnya fleksibel.

Wawancara dilakukan secara snowball dengan: kepala MAN 2 Kota Serang, kelompok guru, kelompok siswa, Ketua Komite MAN, MDC (Madrasah Development Centre) dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Penma) Kanwil Kementerian Agama provinsi Banten. Sumber data kepala MAN untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan standar isi dan standar proses pendidikan yang diterapkan di madrasah. Sumber data kelompok guru untuk mendapatkan data tentang proses pembelajaran yang berlangsung di madrasah dan sistem pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah, budaya mutu, dan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik. Sumber data kelompok siswa untuk mendapatkan data tentang layanan KBM dan kepuasan belajar di madrasah. Sumber data ketua komite madrasah untuk mendapatkan data tentang hubungan kerjasama pihak madrasah dengan masyarakat dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan mutu madrasah terutama dalam mendapatkan dukungan finansial. Sumber data pengawas madrasah untuk mendapatkan data tentang hasil-hasil supervisi, pengawasan dan tindak lanjut program perbaikan kinerja madrasah. Sumber data dari MDC untuk mendapatkan data tentang madrasah dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu madrasah.

Sumber data di atas dalam implementasinya berjalan secara saling keterkaitan antara sumber data satu dengan sumber data lainnya. Hal ini peneliti lakukan untuk cross-check keabsahan data sehingga data yang diperoleh valid dan realibel. Hal ini menjadi dasar dalam menafsirkan dan menyimpulkan hasil penelitian tentang pengembangan mutu pada madrasah.

Voice recorder digunakan penulis ketika wawancara berlangsung untuk merekam hasil-hasil wawancara. Dengan demikian, pada saat wawancara terfokus pada informasi yang digali dari informan dapat diputar ulang untuk merenungkan makna yang terkandung dalam isi wawancara antara peneliti dengan informan. Salinan rekaman kedalam bentuk tulisan dilakukan setiap kali selesai melakukan wawancara. Dengan cara demikian, maka peneliti dapat memilah-milah data yang relevan dengan penelitian ini. Data hasil wawancara diperhalus, dirinci, dan ditafsirkan maknanya dalam konteks sistem penjaminan mutu.

Data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terhadap proses dan kegiatan pembelajaran di madrasah, kegiatan-kegiatan siswa baik yang bersifat akademik seperti belajar mandiri di perpustakaan maupun non akademik seperti kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Standar Isi

Dalam urian terdahulu telah disebutkan bahwa standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran (Mulyasa, 2006: 24).

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa standar isi merupakan materi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga peserta didik memiliki tingkat kompetensi yang telah ditentukan pula. Mengkaji tentang materi dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, maka dalam hal ini tentu akan membahas tentang kurikulum didalamnya.

Secara sederhana, implementasi dapat diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (1979) seperti yang dikutip oleh Nurdin (2005: 70), menyatakan bahwa implementasi sebagai evaluasi. Pengertian lain dikemukakan oleh Schubert (1986) bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Dari pengertian tersebut, Nurdin (2005: 70), menambahkan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh.

Hamalik (2009: 237), menjelaskan bahwa Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Sedangkan standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP no. 32 tahun 2013).

Dengan demikian yang dimaksud dengan implementasi standar isi adalah proses penerapan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam implementasi standar isi pendidikan, akan diketahui sejauh mana cakupan atau ruang lingkup yang terdapat dalam standar isi telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Dalam hal ini, cakupan standar isi menurut PP no 19 tahun 2005 adalah meliputi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi serta memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan/akademik. Sedangkan menurut PP no 32 tahun 2013, ruang lingkup standar isi hanya meliputi ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan (PP no 19 tahun 2005 pasal 1 ayat 14). Sedangkan yang dimaksud dengan struktur kurikulum adalah struktur mata pelajaran yang diterapkan di tingkat satuan pendidikan.

Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pelajaran. Beban belajar di Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah terdiri atas: a) kegiatan tatap muka; b) kegiatan terstruktur; dan c) kegiatan mandiri. Untuk Beban belajar kegiatan tatap muka dinyatakan dalam jumlah jam pelajaran per minggu, dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit. Untuk Beban belajar kegiatan terstruktur dan beban belajar kegiatan mandiri paling banyak 60% (enam puluh persen) dari waktu kegiatan tatap muka yang bersangkutan. Beban belajar satu minggu untuk, Kelas X adalah 42 (empat puluh dua) jam pelajaran, untuk kelas XI adalah 44 (empat puluh empat) jam pelajaran; dan untuk kelas XII adalah 44 (empat puluh empat) jam pelajaran. Beban belajar satu semester di Kelas X dan Kelas XI masing-masing paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif. Beban belajar di kelas XII semester ganjil paling sedikit 18 (delapan belas) minggu efektif dan semester genap paling sedikit 14 (empat belas) minggu efektif (Permendikbud no. 59 tahun 2014).

Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah adanya materi atau isi dari bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Salah satu komponen dalam pembelajaran adalah adanya materi atau isi dari bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada peserta didik. Isi materi pelajaran sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran guru di kelas, merupakan pedoman guru dalam melaksanakan tugasnya dan berfungsi agar materi yang disampaikan kepada peserta didik menjadi terarah dan terfokus.

Merujuk dari beberapa pandangan para pakar pendidikan (Miller dan Seller, Saylor) mengenai Implementasi kurikulum, E. Mulyasa (2007: 97), mengemukakan bahwa Implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dengan demikian implementasi kurikulum merupakan hasil terjemahan guru terhadap kurikulum menyangkut standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang dijabarkan dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai rencana tertulis yang akan bermuara pada proses pembelajaran.

Kajian terhadap kurikulum, maka tentu tidak akan terlepas dari isi materi atau bahan ajar pembelajaran. Karena kurikulum itu sendiri merupakan isi atau rencana belajar yang telah disiapkan oleh pihak sekolah. Adapun kurikulum yang digunakan di madrasah ini memadukan kurikulum 2013 (nasional) dan kurikulum madrasah yang didalamnya *include* pula kurikulum Adiwiyata (kurikulum yang berbasis lingkungan hidup).

Untuk materi pelajaran yang diterapkan di MAN 2 Kota Serang, selaras dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Permendikbud no. 59 tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa mata pelajaran Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah dikelompokkan atas: a) mata pelajaran umum Kelompok A; b) mata pelajaran umum Kelompok B; dan c) mata pelajaran peminatan akademik Kelompok C.

Adapun mata pelajaran umum Kelompok A sebagaimana dimaksud merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Dan mata pelajaran peminatan akademik Kelompok C merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik dalam berbagai pilihan disiplin keilmuan.

Semua materi yang telah ditentukan dalam permendikbud no 59 tahun 2014 seperti yang telah disebutkan di atas, adalah bersifat nasional dan dikembangkan oleh Pemerintah pusat untuk muatan dan acuan pembelajaran mata pelajaran umum pada kelompok A dan C. Sedangkan untuk mata muatan dan acuan pembelajaran pada mata pelajaran kelompok C, dikembangkan oleh Pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan. Materi-materi tersebut pada prinsipnya telah diterapkan dan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang sebagai materi ajar yang disampaikan kepada peserta didik.

Adapun mata pelajaran umum kelompok A, terdiri atas: a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti; b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; c) Bahasa Indonesia; d) Matematika; e) Sejarah Indonesia; dan f) Bahasa Inggris. Sedangkan Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a) Seni Budaya, b) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan c) Prakarya dan Kewirausahaan. Mata pelajaran umum Kelompok B sebagaimana dimaksud di atas, dapat ditambah dengan mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.

Untuk mata pelajaran peminatan Kelompok C dikelompokkan atas: 1) Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; 2) Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial; dan 3) Peminatan Bahasa dan Budaya.

Untuk mata pelajaran pada Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri atas: a) Matematika; b) Biologi; c) Fisika; dan d) Kimia. Sedangkan mata pelajaran pada Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial terdiri atas: a) Geografi; b) Sejarah; c) Sosiologi; dan d) Ekonomi. Adapun mata pelajaran pada Peminatan Bahasa dan Budaya terdiri atas: a) Bahasa dan Sastra Indonesia; b) Bahasa dan Sastra Inggris; c) Bahasa dan Sastra Asing lainnya; dan d) Antropologi.

Pada madrasah Aliyah (MA) terdapat penambahan mata pelajaran rumpun pendidikan agama Islam dan bahasa arab selain Mata pelajaran umum Kelompok A. Adapun rumpun mata pelajaran Pendidikan agama Islam meliputi pelajaran Al Qur'an hadist, Akidah Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), hal ini seperti yang temaktub dalam keputusan Menteri Agama RI, no. 117 tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan standar isi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang, maka diperoleh data sebagai berikut:

Pertama, di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang, telah mendeskripsikan dan merealisasikan muatan 5 kelompok mapel belum optimal. Belum semua prinsip terakomodasi dalam kerangka dasar.

Dari data yang diperoleh hasil penelitian, menunjukkan bahwa di MAN 2 Kota Serang, dalam melaksanakan kurikulum berdasarkan pada prinsip perbaikan layanan, pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, serta pendayagunaan kondisi sosial dan budaya. Adapun bukti nyata dalam hal bahwa pelaksanaan kurikulum di MAN 2 Kota Serang berdasarkan pada prinsip perbaikan layanan dan pengayaan layanan pembelajaran ialah bahwa dalam proses pembelajaran di MAN 2, sangat memperhatikan layanan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didiknya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.

Terdapat beberapa program layanan pembelajaran yang diterapkan di madrasah ini, seperti program matrikulasi, program remedial, program responsi dan program intensif. *Pertama*, program Matrikulasi, program ini dilaksanakan sebagai usaha menyetarakan pengetahuan dasar peserta didik kelas X. Program ini diberikan mengingat input madrasah bersifat terbuka dari lembaga pendidikan menengah pertama (SMP) dan MTs. Yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun belum dapat digeneralisasi namun pada umumnya peserta didik dari MTs memiliki kelemahan pada mata pelajaran eksak. Sedangkan SMP memiliki kelamahan pada mata pelajaran bahasa Arab. Peserta didik yang lemah pada mata pelajaran tersebut berdasarkan hasil tes seleksi peserta didik baru akan diberikan program matrikulasi sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, program remedial, program ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pengayaan materi pengajaran secara horizontal. Program ini diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. *Ketiga*, program responsi. Program ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penguatan konsep dan pengayaan materi pelajaran yang dalam penguasaan materinya menuntut sikap pemahaman yang lebih dan mata pelajaran tersebut diujikan secara nasional, seperti: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Ekonomi. Jadi program ini diperuntukkan bagi peserta didik kelas XII. Adapun waktu pelaksanaan program ini adalah pada hari kegiatan pengembangan diri manakala peserta didik kelas X dan XI melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Program Responsi berupa kegiatan terstruktur dengan silabus responsi tersendiri. Dan *keempat*, Program Intensif. Program ini merupakan program tambahan yang diberikan kepada peserta didik kelas XII sebagai persiapan mengikuti ujian akhir madrasah (UAM) dan masuk ke perguruan tinggi yang dilaksanakan secara rutin dan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Pelaksanaannya di bagi dalam 2 tahap. Tahap satu dimulai pada bulan November semester ganjil sampai dengan menjelang Ujian Akhir Madrasah (UAM) dengan materi yang diperlukan untuk persiapan menempuh ujian akhir madrasah. Tahap dua dimulai satu minggu setelah ujian akhir madrasah (UAM) berakhir sampai menjelang SPMB dengan materi yang diperlukan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.

Bentuk perbaikan layanan pembelajaran adalah upaya MAN 2 dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Berikut tabel mengenai analisis standar isi di MAN 2 Kota Serang.

Tabel 4.7
Tabel Analisis Standar Isi

Komponen	Deskripsi	Pelaksanaan
1. Kerangka Dasar Kurikulum	1. Kelompok Mata pelajaran 2. Prinsip pengembangan kurikulum	Kurikulum di MAN 2 Kota Serang memuat 5 kelompok mata pelajaran. Kerangka dasar kurikulum mendeskripsikan prinsip pengembangan kurikulum
2. Struktur Kurikulum	Struktur kurikulum memuat mata pelajaran dan muok sesuai dengan jurusan	Struktur kurikulum menggambarkan standar minimal secara Nasional sesuai permendiknas no 22/2006
3. Beban Belajar	Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik	Peserta didik mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

2. Implementasi Standar Proses

Dalam Penerapan standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, melalui standar proses pendidikan setiap guru atau pengelola sekolah dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar proses. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: *pertama*, guru. Standar proses berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran maka faktor yang dianggap sangat mempengaruhi proses pembelajaran adalah Guru. Guru yang dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan sungguh- sungguh melalui perencanaan yang matang dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dan memperhatikan taraf perkembangan intelektual dan perkembangan psikologi belajar anak, maka akan menghasilkan kualitas lulusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang dalam pengelolaan pembelajaran dilakukan seadanya tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran (Sanjaya, 2006: 5) .

Oleh sebab itu, dalam implementasi standar proses pendidikan, guru perlu memahami sekurang- kurangnya tiga hal, yaitu: *Pertama*, pemahaman dalam perencanaan program pendidikan yaitu menyangkut pemahaman dalam menjabarkan isi kedalam bentuk silabus yang dapat dijadikan dalam pembelajaran. *Kedua*, pemahaman dalam pengelolaan pembelajaran termasuk dalam desain dan implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan isi pendidikan. *Ketiga*, pemahaman tentang evaluasi, baik yang berhubungan dengan evaluasi proses maupun evaluasi hasil pembelajaran (Sanjaya, 2006: 11).

Selain guru, faktor yang kedua adalah siswa, karena pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa, maka proses pembelajaran harus melibatkan siswa dan berpusat pada siswa. Proses pembelajaran bisa terjadi dimana saja, kelas bukan satu- satunya tempat belajar siswa. Bakat, minat, dan motivasi belajar siswa berbeda satu sama lain. Penguasaan materi pelajaran bukanlah akhir dari proses pembelajaran akan tetapi hanya sebagai tujuan untuk membentuk tingkah laku yang lebih luas. Artinya sejauh mana materi pelajaran dikuasai siswa dapat membentuk pola perilaku siswa itu sendiri, untuk itulah metode dan strategi yang digunakan guru tidak hanya sekedar metode ceramah tetapi menggunakan berbagai metode seperti diskusi, penugasan, kunjungan ke objek- objek tertentu dan lain sebagainya (Sanjaya, 2006: 100).

Dalam hal ini, pelaksanaan di MAN 2 Kota Serang sudah sebagian besar guru menggunakan bervariasi metode pembelajaran. Sistem ceramah bukan satu-satunya cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Sebagian besar guru di MAN 2 Kota Serang menggunakan berbagai macam metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran, seperti metode diskusi, inquiry, pembiasaan, keteladanan dan sebagainya, di samping menggunakan alat media pembelajaran berupa infokus.

Faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan standar proses pendidikan ialah dukungan orangtua dan masyarakat, sarana prasarana yang memadai akan memiliki kualitas pembelajaran yang lebih bagus dibandingkan dengan sekolah-sekolah dengan sarana prasarana yang sangat terbatas, serta dukungan orangtua dan masyarakat yang sangat tinggi.

Faktor kemampuan dalam sekolah seperti kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah serta biaya yang tersedia untuk melaksanakan tugas- tugas rutin dan tugas- tugas inovatif di dalam lingkungan sekolah termasuk didalamnya fasilitas fisik gedung yang menyenangkan, sarana prasarana yang memadai juga sangat menentukan performance proses pembelajaran dalam sebuah lembaga sekolah (Tilaar, 2006: 80).

Berdasarkan penelitian di MAN 2 Kota tentang implementasi standar proses, diperoleh data sebagai berikut: 1) mengenai silabus, di madrasah telah menerapkan silabus yang sesuai dengan SI, SKL, dan panduan KTSP. 2) Guru-guru di madrasah telah membuat RPP berdasarkan program tahunan, program semester dan silabus, dan mempertimbangkan berbagai kebutuhan pembelajaran yang berbeda dan merencanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan tersebut. 3) mengenai pelaksanaan pembelajaran, di peroleh data bahwa di madrasah negeri 2 kota serang, dalam pelaksanaan pembelajaran ditemukan masih ada beberapa rombongan belajar yang melebihi kapasitas jumlah siswa dalam setiap rombel. Di mana untuk setiap kelas atau rombongan belajar maksimal memuat 32 siswa. *Kedua*, mengenai proses pelaksanaan pembelajaran di kelas, pada

kenyataannya guru sebagian besar memulainya dengan kegiatan pendahuluan, bisa berupa tadarus Al Qur'an atau apersepsi. Dan dilanjutkan dengan kegiatan inti pembelajaran, dan kemudian diakhiri dengan penilaian. Penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Salah satu ciri sekolah/madrasah yang bermutu dan berkualitas baik adalah adanya sistem penjaminan mutu yang diterapkan baik oleh pihak pengelola lembaga pendidikan yang bersangkutan (internal) maupun oleh pihak luar (eksternal) yang bertugas memberikan jaminan mutu pada setiap lembaga pendidikan baik sekolah ataupun madrasah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang, madrasah Terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam peningkatan mutu pendidikan. Madrasah sebagai bagian dari sub pendidikan nasional tentu harus memiliki sistem pengelolaan/manajemen yang baik sebagaimana umumnya sistem pengelolaan/manajemen pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah umum lainnya. Dengan penerapan sistem manajemen pendidikan yang baik, maka akan diperoleh mutu atau kualitas sekolah/madrasah yang baik, terutama kualitas output atau lulusannya. Dengan demikian, implementasi Manajemen Mutu dalam suatu lembaga pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama merupakan suatu keharusan bagi setiap lembaga penyelenggara pendidikan.

Untuk mencapai standar mutu pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di MAN 2 Kota Serang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan dikembangkan berdasarkan tujuan lembaga. Adapun standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan di MAN 2 Kota Serang adalah sebagai berikut: 1) berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam dan usia psikologis perkembangannya, 2) mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya, 3) menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan dan pekerjaannya, 4) berpartisipasi dalam penegakkan aturan-aturan sosial, 5) menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras dan golongan sosial dan ekonomi dalam lingkup global, 6) membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif dan inovatif, 7) menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan, 8) menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri, 9) menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik, 10) menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks, 11) menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial, 12) memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab, 13) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 14) mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya, 15) mengapresiasi karya seni dan budaya, 16) menghasilkan karya kreatif baik individual maupun kelompok, 17) menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani serta kebersihan lingkungan, 18) berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun, 19) memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat, 20)

menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain, 21) menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis, 22) menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, 23) menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi, dan 24) memahami, menghayati dan menerapkan jiwa kewirausahaan dalam kehidupan.

Untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditentukan tersebut, maka diperlukan sebuah upaya melalui proses pendidikan. Kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran yang diterapkan di MAN 2 Kota Serang ialah proses pembelajaran aktif. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh guru dalam melakukan pembelajaran di kelas, melalui model pembelajaran partisipatif dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Dengan model ini, maka diharapkan dalam proses pembelajaran akan terjadi komunikasi dari berbagai arah sehingga demokratisasi dalam pembelajaran terjadi secara terbuka. Semua peserta didik diberi kesempatan untuk berani bertanya, mengemukakan pendapat dan berargumentasi. Dengan pendekatan seperti ini, maka keaktifan siswa di dalam kelas, merupakan suatu keharusan.

Selain itu, pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat antara peserta didik dan pendidik. Metode pembelajaran diarahkan dan berpusat pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator mendorong peserta didik agar mampu belajar secara aktif, baik fisik maupun mental. Peserta didik juga diajarkan untuk pandai menghargai pendapat yang berbeda.

Kegiatan pembelajaran juga tidak terbatas pada tatap muka dengan guru tetapi juga peserta didik diberi kesempatan untuk memperkaya pengalaman yakni melalui studi ke beberapa tempat atau obyek yang berkaitan dengan mata pelajaran seperti perkampungan Baduy, BATAN, PPIPTEK, Museum dan lain sebagainya. Di beberapa tempat tersebut peserta didik dapat menguji teori dan berbagai konsep atau menambah wawasan baru sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara komprehensif.

Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran juga menerapkan beragam kiat dan memanfaatkan beragam media untuk menambah kemampuan dan daya serap peserta didik terhadap materi pelajaran. Adapun media yang digunakan adalah seperti infocus, OHP, Slide, TV atau Video, Lab. Bahasa, Lab. PAI, Perpustakaan dan Internet.

Sebagai pengemban amanat bangsa sekolah ini terus mengupayakan peningkatan-peningkatan mutu pendidikan baik input, proses, dan output yang terus dilakukan secara berkesinambungan. Adapun yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang adalah sebagai berikut: *Pertama*, menyangkut input pendidikan, MAN 2 Kota Serang dalam menerima siswa atau peserta didik baru ditentukan berdasarkan ujian penerimaan siswa baru. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjaring peserta didik yang memiliki kemampuan belajar baik dari kognitif afektif dan psikomotorik. Di samping itu, MAN 2 juga mengupayakan profesionalitas bagi warga sekolah dalam mengembangkan kepribadian bagi seorang pendidik atau skill. Ini di buktikan oleh kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh madrasah berupa workshop, seminar-seminar, loka karya dan upaya guru-guru untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Ini semua dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas bagi semua warga dalam mengemban amanah pendidikan sebagai wujud dalam peningkatan kualitas pendidikan yang memadai. *Kedua*, Menyangkut Proses Pendidikan. Dalam hal ini MAN 2 Kota Serang lebih menekankan pada penciptaan suasana lingkungan yang bersahabat. Dalam hal ini sekolah mengupayakan untuk mengajak bagi semua

warga sekolah untuk menjalin kerjasama antara siswa, guru, kepala sekolah, pegawai dan juga pihak-pihak yang berkompeten. Dalam hal ini pihak sekolah mengadakan rapat guru, rapat wali murid dan juga segenap para komite sekolah unjtuk diajak bersama-sama dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Sebagai perwujudan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas MAN 2 Kota Serang mengupayakan kerjasama dengan berbagai intansi baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta.

Ketiga, berhubungan dengan output pendidikan MAN 2 Kota Serang sebagai lembaga pendidikan yang memiliki amanah utuk mencetak generasi yang berkompeten nantinya. Maka dalam hal ini sekolah mengupayakan dorongan-dorongan kepada semua siswa untuk berprestasi dan bersaing dalam meraih prestasiprestasi, serta penanaman dan pembinaan mental spiritual agar terwujud output yang yang berprestasi dan berakhlakul karimah.

Adapun faktor pendukung yang menentukan peningkatan mutu pendidikan di sekolah diantaranya adalah:

- a. Kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pucuk pemimpin disekolah, ia memiliki peran yang strategis dalam melakukan upaya-upaya peningkatan mutu baik itu yang berhubungan dengan input, proses dan output dalam pendidikan.
- b. Tenaga pendidikan.
Guru maupun tenaga kependidikan disekolah sangat penting keberadaanya karena tanpa guru dan tenaga kependidikan, sebuah lembaga pendidikan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatannya. Maka dalam hal ini tentu harus mendapat perhatian yang maksimal dan bahkan kompetensi dan profesionalisme sebagai tenaga kependidikan harus dikembangkan terus.
- c. Peserta didik
Peserta didik merupakan dari input pendidikan yang tidak kalah pentingnya dari input pendidikan yang lain, maka harus mendapat penanganan yang tidak bisa dilihat sepele.
- d. Dan sumber daya selebihnya (dana, kurikulum, sarana dan prasarana dll)
 - a. Suasana lingkungan yang kondusif, hubungan warga sekolah, masyarakat, dan intansi-intansi yang lain. Yang mana faktor-tersebut diatas harus mendapat perhatian dan pengelolaan yang penuh

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang dijadikan sumber data, karakteristik mutu Madrasah Aliyah di Provinsi Banten khususnya di Kota Serang, direpresentasikan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang. Banyak faktor pendukung yang menjadi alasan mengapa madrasah ini dapat dikatakan representatif atau memiliki mutu/kualitas yang baik. Di antara beberapa faktor tersebut salah satunya adalah output/lulusan yang dihasilkan oleh madrasah begitu memuaskan yakni sebesar 100%, disamping jumlah lulusan yang begitu besar, pada umumnya mereka yang telah selesai menempuh pendidikan di madrasah ini melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu ke Perguruan-perguruan tinggi terkemuka baik di dalam maupun luar negeri.

Meningkatnya kompetensi lulusan/otput yang dihasilkan oleh madrasah tentu tidak begitu saja terjadi, banyak faktor pendukung lainnya disertai dengan proses yang panjang sehingga madrasah mampu menghasilkan kompetensi lulusan yang begitu memuaskan.

Di atas telah disebutkan bahwa di MAN 2 Kota Serang terdapat banyak sekali potensi yang dimiliki madrasah seperti sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, pendidik

dan tenaga kependidikan yang mumpuni dan kompeten, kurikulum yang bervariasi, Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) dan juga Sistem Boarding School (asrama siswa) yang diterapkan oleh madrasah, semuanya merupakan faktor pendukung untuk mengantarkan peserta didiknya menjadi lulusan yang berkualitas.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor pendukung terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan berlangsung maksimal. Suatu lembaga pendidikan jika tidak didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, sudah barang tentu dapat dikatakan proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak akan berlangsung secara efektif dan efisien. Namun begitu, bukan berarti kelengkapan sarana dan prasarana merupakan satu-satunya faktor penentu dalam keberhasilan dalam proses pembelajaran. Faktor pendidik dan tenaga kependidikan dapat juga berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran. Sebesar apapun kemauan peserta didik untuk belajar tanpa didukung dengan tenaga pendidik (guru) yang kompeten dan ahli dalam bidangnya, maka materi pelajaran yang disampaikan tidak akan terserap sepenuhnya oleh peserta didik.

Oleh karena itu, MAN 2 Kota Serang sebagai madrasah model dan keterampilan, disamping memberikan keterampilan terhadap peserta didiknya, madrasah juga bekerjasama dengan kementerian agama provinsi bidang Pendidikan Madrasah serta MDC (madrasah development centre) dalam kegiatan pelatihan dan pembinaan serta pedampingan kepada para guru-guru di MAN 2 Kota Serang dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme pada setiap guru yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kemampuan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung di madrasah.

Data statistik tentang peningkatan mutu lulusan dapat diperoleh berdasarkan dokumen yang ada di MAN 2 Kota Serang yang menunjukkan angka kelulusan 100% selama tujuh tahun berturut-turut. Madrasah yang sejak tahun 1998 ditetapkan sebagai MAN Model ini, merupakan lokomotif madrasah dan ditiru oleh MAN lainnya se Provinsi Banten umumnya dan Kota Serang khususnya.

Berdasarkan hasil observasi di MAN 2 Kota Serang, terdapat sejumlah piala kejuaraan yang dipajang di ruang depan madrasah (ruang penerimaan tamu), karena begitu banyak piala kejuaraan yang dimiliki oleh madrasah ini, sehingga di dalam ruangan kepala madrasah juga masih ditemui banyak piala yang dipajang didalamnya. Piala-piala yang dimiliki oleh madrasah ini merupakan hasil prestasi siswa tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga prestasi non akademik baik berupa pengembangan bakat bidang olahraga dan seni.

Wina Sanjaya (2008: 151), menerangkan bahwa kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai Implementasi. Lebih lanjut, Ia menjelaskan yang dimaksud dengan kurikulum sebagai dokumen melahirkan bentuk kurikulum tertulis, yang kemudian dijadikan pedoman bagi setiap pengembang kurikulum termasuk guru. Kurikulum tertulis ini memiliki sifat dan fungsi sebagai pedoman, maka kurikulum tertulis ini merupakan kurikulum formal atau kurikulum potensial. Sedangkan kurikulum sebagai implementasi adalah realitas dari pelaksanaan kurikulum operasional di lapangan, yang tiada lain adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Proses implementasi inilah yang kemudian dinamakan kurikulum nyata (*real curriculum*), yang memiliki fungsi dan peranan yang sama pentingnya dengan kurikulum potensial.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang peningkatan mutu pendidikan melalui imlementasi standar isi dan standar proses pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Serang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui standar isi ialah melalui:
 - a. Pengembangan materi atau isi kurikulum sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005. Muatan kurikulum yang terdapat di MAN 2 Kota Serang meliputi: 1) Mata pelajaran, 2) muatan lokal, 3) kegiatan pengembangan diri, 4) pengaturan beban belajar, 5) ketuntasan belajar, 6) kenaikan kelas dan kelulusan, 7) penjurusan, 8) pendidikan kecakapan hidup dan 9) pendidikan berbasis keunggulan global dan lokal.
 - b. Dalam penyusunan kurikulum, MAN 2 Kota Serang selalu melibatkan guru, kepala sekolah dan pihak-pihak terkait seperti kepala bidang pendidikan madrasah kantor kementerian agama provinsi dan pihak pengembangan madrasah (MDC).
 - c. Adapun program pengembangan diri yang dilaksanakan di MAN 2 Kota Serang yaitu: kegiatan konseling tentang kehidupan pribadi, sosial, karir, kesulitan belajar, dan sebagainya; dan kegiatan ekstrakurikuler seperti kepramukaan, kepemimpinan, Palang Merah Remaja (PMR), Karya Ilmiah Remaja (KIR), sanggar seni, dan lain-lain Khusus untuk materi pengembangan keterampilan meliputi jurusan elektronik, furniture dan tata busana.
2. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui standar proses ialah melalui:
 - a. Meningkatkan layanan belajar terhadap seluruh siswa-siswi madrasah baik dengan cara penambahan alokasi waktu belajar, maupun mengembangkan program-program unggulan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat dan mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh para siswa-siswi MAN 2 Kota Serang
 - b. Menjaring siswa lulusan MTs atau SMP yang akan memasuki madrasah dengan cara mengadakan seleksi penerimaan siswa baru yang begitu selektif dan kompetitif. Hal demikian akan sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, karena dengan input yang bermutu dan berkualitas, maka akan diperoleh output yang berkualitas pula.
 - d. Memberdayakan pusat sumber belajar bersama guna menunjang proses pembelajaran yang dilakukan agar berlangsung secara maksimal.
 - c. Pelatihan terhadap guru mata pelajaran merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pengetahuan guru, sehingga akan membantu guru dalam proses pembelajaran yang berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas.

Untuk melengkapi akhir dari penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak madrasah, agar tetap mengembangkan standar isi yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti yang tertuang baik dalam Peraturan

Pemerintah no 19 tahun 2005. Di samping itu, pihak madrasah juga agar tidak hanya fokus terhadap standar isi (materi/kurikulum) dan kurang memperhatikan dari hasil yang diperoleh setelah melaksanakan kurikulum yang digunakan tanpa ada evaluasi atau penilaian yang baik dan benar. Selanjutnya, kiranya pihak madrasah mampu mengembangkan materi kurikulum tersebut dan tidak hanya terpaku pada standar yang telah ditentukan, namun dikembangkan sesuai dengan potensi siswa dan keadaan sosial dan kearifan lokal yang ada. Di samping itu, pihak madrasah juga kiranya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel) atau kelas.
 - b. Kelengkapan bahan ajar yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari seperti tersedianya buku paket pelajaran dan buku tugas siswa dan lain-lain
 - c. Memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung dikelas, setidaknya harus ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
 - d. Penerapan metode dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan kepada siswa.
2. Kepada para guru yang telah mengikuti pelatihan, kiranya mampu mengaplikasikan ilmu dari hasil pelatihan yang diikutinya agar proses pembelajaran berlangsung secara maksimal dan memuaskan.
 3. Pihak madrasah terutama guru dan kepala madrasah agar selalu memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung di madrasah. Hal ini dikarenakan sebagai apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh madrasah, sebaik apapun metode yang digunakan dalam pembelajaran serta sepintar apapun pendidik tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung baik di dalam kelas maupun di luar, baik di dalam lingkungan madrasah maupun di luar serta tanpa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, maka hasil yang akan diperoleh dari proses pembelajaran tersebut tidak akan berhasil semaksimal mungkin.
 4. Kepada komite sekolah/madrasah agar selalu menjalin kordinasi yang baik dan terjadwal dengan pihak madrasah dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas madrasah.
 5. Kepada bidang pendidikan madrasah provinsi banten agar selalu membina madrasah-madrasah yang memiliki potensi menjadi madrasah unggulan sehingga menjadi madrasah yang bertaraf nasional.
 6. Kepada para peneliti selanjutnya, agar kiranya dapat mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan selain dari pada standar isi dan proses pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abrasi, Muhammad Athiyah. (1985). *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Alek. (2010). “Menyoal Konsep Mutu dalam Kebijakan Pendidikan”, dalam Chan Sam M. dan Emzir. (edt.), *Isu-Isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Bogor: Galia Indonesia
- Ali, Mohammad. (2009). *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pt. IMTIMA
- Anwar, Endang Saeful., dkk. (2008). *Laporan Akhir Hasil Penelitian tahun 2008, Strategi Mathla’ul Anwar Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Banten*. Serang: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
- Anwar, Moch.Idochi. (2013). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pres
- Arcaro, Jerome S. (2007). *Quality in education: An Implementation Handbook*, terj. Yosol Iriantara, *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ariani, Dorothea Wahyu,. (1999). *Manajemen Kualitas*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Arief, Armai. (2005). *Reformulasi Pendidikan Islam*. Jakarta: CRSD Pres
- Arif, Mahmud (2008). *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: Lkis
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. (2010). *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Bottery, Mike. (2008). Educational Leaders in a Globalising world, in Joyce Huth Munro, *Educational Leadership*. New York: The McGraw-Hill Companies
- Danim, Sudarwan. (2007). *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Daulay, Haidar Putra. (2006). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djojonegoro, Wardiman. (1996). *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Engkoswara & Komariah, Aan. (2012). *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Fajar, A. Malik. (1998). *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI)
- Fatah, Nanang. (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Fatah, Nanang. (2012). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fatoni, Sulthan. (2006). *Peradaban Islam Disain Awal Peradaban, Konsolidasi Teologi, Konstruksi Pemikiran dan Pencarian Madrasah*. Jakarta: Elsas

- Fauzi, Anis., dkk. (2008). *Laporan Hasil Penelitian Block Grant tahun 2008; Perkembangan dan Pembinaan Madrasah Diniyah di Kabupaten Serang*. Serang: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
- Glassser, William. (1992). *The Quality School: Managing Students Without Coercion*. United States: Harper Collins Publishers
- Handoko, (2003). *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Hasanah, Umdatul. (2008). *Laporan Hasil Penelitian tahun 2008, Pondok Pesantren Tradisional dan Industrialisasi; Eksistensi dan Peran Pondok Pesantren Tradisional dalam Pembangunan Masyarakat Kota Industri Cilegon*. Serang: IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten
- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Irianto, Yoyon Bahtiar. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press
- Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten. (2013). *Buku Statistik Pendidikan Madrasah*, Serang: Kemenag Kanwil Prov. Banten
- Koswara, Deni., & Triatna, Cepi. (2011). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, dalam Riduwan, (Ed.) *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Maksum. (1999). *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Mantra, Ida bagoes., & Kasto. (2011). dalam Singarimbun, Masri., & Efendi, Sofian. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Martin Van Bruinessen, (1999). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Mochtar, Afandi., Kusmana. (2008). *Model Baru Pendidikan: Melanjutkan Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, dalam Kusmana, dan JM Muslimin Ed, *Paradigma Baru Pendidikan Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhaimin, dkk. (2012). *Manajemen Pendidikan; Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhaimin., & Mujib, Abdul. (1993). *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Jakarta: Trigenda Karya
- Mulyana, Deddy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyono. (2010). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- Mustofa, A., & Aly, Abdullah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Mutohar, Prim Masrokan. (2013). *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Nandika, Dodi. (2007). *Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Nata, Abuddin. (2003). *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Rahim, Husni. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: logos
- Rahim, Husni. (2005). *Madrasah Dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Logos
- Ridney T. Ogawa and Paula A. White, (1994). In Susan Albers Mohrman and Associates, *School Based Management: Organizing For High Performance*. United States: The Jossey-Bass Education Series
- Rochaety, Eti. dkk. (2006). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Rohiat. (2010). *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sallis, Edward. (2006). Alih Bahasa Riyadi, Ahmad Ali. *Total Quality Management Dalam Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD
- Saridjo, Marwan. (2011). *Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa*, Bogor: Yayasan Ngali Aksara dan Al Manar Press
- Shaleh, Abdul Rachman. (2006). *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sudjanto, Bedjo. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Cv. Sagung Seto/Anggota IKAPI
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suharsaputra, Uhar. (2010). *Adminitrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Program Pascasarjana UPI dan Remaja Rosda Karya
- Sunarya, E.,. (2000). *Pengantar Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Yogyakarta: Adicita
- Suryadi, (2009). *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: PT. Sarana Panca Karya Nusa
- Suyanto, Abbas, M.S. (2011). *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa

- Syafaruddin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: PT. Grasindo
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Usman, Husaini. (2008). *Manajemen: Teori, Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Yunus, Mahmud. (1983). *Methodik Khusus Pendidikan Agama*. Jakarta: Hidakarya Agung
- Yunus, Mahmud. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Zazin, Nur. (2011). *Gerakan Menata Mutu Pendidikan; Teori dan Aplikasi*, Jogjakarta: Ar ruzz media
- Zuhairini, dkk. (2006). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.